



Email:

¹timbangnusavinne@gmail.com

²tumiwaevi25@gmail.com

³riedelgosal3@gmail.com

Diterima tanggal:

16 Juni 2025

Disetujui Tanggal:

12 September 2025

Kajian Historis Hubungan GMIM dan Pemerintah dari tahun 1934-1967 Sebagai Landasan Membangun Sinergitas Gereja dan Pemerintah

ABSTRACT

This study discusses the historical relationship between GMIM and the government from 1934 to 1967, which became the basis for building synergy between the church and the government. The main problem found was the low level of knowledge among congregations regarding the relationship between GMIM and the government since GMIM was founded. This study employs qualitative research methods and historical research, utilizing literature review techniques on books and archives, as well as interviews to complement the perspective on the relationship between the church and the government in the present day. The results of this study indicate that GMIM and the government have maintained a fluctuating relationship since 1934-1967. Although GMIM has faced pressure from the government, the relationship has remained intact and unbroken, whether through cooperation, GMIM's reprimands of the government, or GMIM's firm stance toward the government. Integrity and boundaries between GMIM and the government are essential to prevent the mixing of church and government affairs in this cooperation.

Keywords: GMIM; Government; History; Relationship; Synergy

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Kajian Historis Hubungan GMIM dan Pemerintah dari tahun 1934-1967 yang menjadi landasan dalam membangun sinergitas gereja dan pemerintah masalah utama yang ditemukan adalah rendahnya pengetahuan jemaat mengenai hubungan GMIM dan Pemerintah sedari GMIM berdiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta penelitian sejarah dengan menggunakan teknik pengumpulan data kajian pustaka pada buku-buku dan arsip-arsip serta wawancara untuk melengkapi pandangan mengenai hubungan gereja dan pemerintah pada masa kini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GMIM dan pemerintah menjalin hubungan yang pasang surut sedari 1934-1967 walaupun GMIM pernah berada dalam tekanan pemerintah namun hubungan itu tetap terjalin dan tidak terputus, entah Kerjasama, teguran GMIM pada pemerintah bahkan GMIM tegas kepada pemerintah. Integritas dan batasan antara GMIM dan pemerintah agar tidak terjadi pencampuran dalam urusan gereja dan pemerintah dalam Kerjasama ini.

Kata Kunci: GMIM; Hubungan; Pemerintah; Sejarah; Sinergitas

PENDAHULUAN

Gereja merupakan sekumpulan umat-umat yang dipilih Allah yang telah mengaku percaya dan beriman, serta menaruh segala kesetiaan, kepercayaan bahkan jalannya kehidupannya bagi kemuliaan dan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Allah dan Firman-Nya merupakan hal yang dilakukan umat percaya dengan bentuk gereja. Gereja berperan membawa misi pemberitaan firman Tuhan bagi setiap umat yang mengaku percaya dan ingin mengikut Kristus. Kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan damai bagi kehidupan disekitarnya, karena itulah misi gereja yaitu membawa damai dimanapun ia ada, hadir dan melayani.

Berbeda dengan gereja, pemerintah adalah lembaga yang diutus oleh Allah untuk menjalankan fungsi kepemimpinan dan menjaga ketertiban di suatu negara atau wilayah sesuai dengan kehendak ilahi (bdk. Roma 13:1). Pemerintah bukanlah penguasa absolut, melainkan pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengayomi, menuntun, dan menyejahterakan masyarakat. Dalam pandangan iman Kristen, pemerintah diharapkan menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan publik. Allah juga menghendaki agar umat-Nya, sebagai bagian dari masyarakat, mematuhi pemerintah dan turut membangun bangsa secara aktif dalam semangat kerja sama (lih. Roma 13:1–5). Dengan demikian, pemerintah dan gereja sesungguhnya memiliki tujuan yang serupa, yakni menciptakan tatanan hidup yang damai, adil, dan sejahtera, meskipun melalui mandat yang berbeda.

Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) merupakan persekutuan orang-orang Minahasa dan suku-suku lainnya, baik yang tinggal di tanah Minahasa maupun di luar Minahasa, yang percaya kepada Yesus Kristus dan terpenggil untuk memberitakan karya-karya besar Tuhan Allah serta menjadi berkat di mana pun dan mereka berada. GMIM adalah komunitas umat Kristiani yang setiaewartakan Injil sesuai dengan Amanat Agung Yesus Kristus, yang adalah pusat dan isi dari kabar keselamatan itu sendiri. GMIM adalah lahir sebagai buah dari pelayanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh para misionaris di tanah Minahasa sejak abad ke-19. Karena Injil merupakan dasar identitas GMIM, maka GMIM terpenggil untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Hal ini sejalan dengan karakteristik gereja yang esa, kudus, am, dan universal.¹

GMIM dalam Tata Gereja tahun 2021 yang menyatakan bahwa GMIM terpenggil untuk mengadakan hubungan Kerjasama yang positif, kritis, realistik dan dinamis dengan Lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam segala bentuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GMIM.² Sejalan dengan yang dikatakan oleh John Calvin mengenai hubungan gereja dan negara bahwa baik pemerintah maupun gereja merupakan perantara-perantara dan hamba-hamba dari Allah, mereka bersifat saling melengkapi dari pada saling menyaingi, gereja dan negara bekerja untuk maksud yang sama namun berbeda lingkungan dan cara bertindak.³ Namun seringkali yang terjadi adalah bahwa masyarakat dan jemaat memandang bahwa hubungan Kerjasama antara gereja dan negara adalah hal tidak baik, dikarenakan gereja yang

¹ *Tata Gereja 2021* (Tomohon: Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, 2021), h.3.

² *TATA GEREJA 2021*, h.13.

³ Alister E. McGrath, *Sejarah Pemikiran Reformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), h.13.

memiliki citra yang suci dan pemerintah dengan segala hal yang ada didalamnya yang dianggap tidak baik jika dihubungkan dengan gereja, dalam hal ini Calvin memisahkan kuasa gereja dan negara, sebab pemerintah wajib takluk kepada pemerintahan Allah, namun hal itu tidak berarti bahwa gereja harus memerintah negara begitupun sebaliknya.⁴ Ini berarti bahwa gereja dan negara bisa bekerjasama untuk mendatangkan damai sejahtera, namun gereja harus menjaga integritasnya sebagai gereja dan negara jangan terlalu ikut campur dalam urusan gereja, gereja dan pemerintah harus saling menjaga Batasan. Maka dari itu hubungan gereja dan pemerintah bukanlah hal yang harus namun pasti ada dikarenakan gereja dan pemerintah mempunyai pelayanan dengan tujuan yang sama namun dalam instansi yang berbeda.

Dengan adanya pandangan yang tidak sesuai yang terjadi dalam kehidupan kerjasama gereja dan negara, seperti pandangan jemaat dan masyarakat yang menganggap bahwa gereja dan negara adalah dua lembaga yang tidak seharusnya bekerja sama karena gereja memiliki citra yang ilahi yang dekat dengan Tuhan Allah yang kudus. Sedangkan, pemerintah dipandang sebagai Lembaga yang akan membawa dampak negatif bagi gereja, karena adanya peristiwa dalam pemerintahan seperti korupsi, suap dan penyalahgunaan jabatan. Sehingga Kerjasama ini dianggap tidak baik. Oleh karena itu sejarah perjalanan hubungan GMIM dan pemerintah membawa pada pandangan baru, bahwa gereja dan pemerintah mempunyai hubungan yang baik sedari GMIM berdiri, sekalipun ada saja pertentangan didalamnya namun dapat dilihat bahwa walaupun ada pertentangan namun ternyata hubungan itu tetap terjalin dan baik sampai pada saat ini.

Kajian mengenai hubungan Gereja dan negara, terlebih khusus hubungan GMIM dan pemerintah, bukanlah hal yang baru. Salah satunya oleh Grace Toreh dalam artikel yang berjudul "Peranan GMIM Dalam Meningkatkan Kapasitas Masyarakat di Bidang Politik" dalam penelitian ini dijelaskan tentang pentingnya memberikan Pendidikan politik bagi warga gereja terlebih khusus GMIM dengan tujuan memberikan sudut pandang baru kepada jemaat untuk menjalakan kehidupan yang berbangsa dan bernegara dengan baik serta memberikan contoh akan pelayanan pendeta dalam pemerintah.⁵ Sementara itu, didalam artikel ini berfokus pada kajian historis mengenai hubungan GMIM dan pemerintah dalam rentang waktu 1934-1967. Dengan mengacu pada data sejarah dan peristiwa yang benar-benar terjadi, bertujuan untuk memberikan pemahaman kontekstual yang dapat menjadi pembelajaran bagi kehidupan gereja dan masyarakat masa ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami realitas sosial dan historis sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Pendekatan ini selaras dengan metode penelitian sejarah, yang bertujuan merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis untuk diintrospeksikan sebagai pembelajaran bagi konteks masa kini⁶. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap arsip dan literatur yang relevan

⁴ Hendrikus Berkhof, *Sejarah gereja* (BPK Gunung Mulia, t.t.), h.17.

⁵ Grace Toreh, "Peranan Gmim (Gereja Masehi Injili Di Minahasa) Dalam Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Di Bidang Politik," *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 1 (1 Mei 2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/1448>.

⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015), h.3.

dengan topik penelitian. Studi Pustaka dipilih karena data historis dalam bentuk arsip dan literatur bersifat tetap dan tidak terpengaruh oleh perubahan ruang dan waktu.⁷ Penelitian ini secara khusus menggunakan pendekatan historis yang bertujuan merekonstruksi dan menganalisis kejadian masa lalu secara sistematis. Penelitian historis dilakukan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi data masa lalu secara sistematis, untuk memahami penyebab, perkembangan, dan dampaknya terhadap konteks masa dan masa depan.⁸

Oleh karena itu, metode ini sesuai dengan pendekatan sejarah yang mengandalkan sumber tertulis sebagai data primer yang tidak berubah. Selain studi Pustaka, data juga diperoleh melalui wawancara kepada informan yang relevan, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi dan pengalaman terkait hubungan GMIM dan pemerintah. Wawancara dilakukan secara tetap muka dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai sesuai topik penelitian. Wawancara dilakukan untuk merekonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.⁹

HASIL PEMBAHASAN

GMIM Pada Masa Pemerintahan Belanda 1934-1942

Pada 30 September 1934 GMIM resmi berdiri sendiri sebagai gereja mandiri, namun kepemimpinan GMIM dari tahun 1934-1942 masih diserahkan kepada pendeta yang berasal dari Belanda, utusan Kerk Bestuur, Indische Kerk yang merupakan gereja pemerintah.¹⁰ Penetapan Ketua Sinode GMIM serta para pemimpin di tingkat klasis dan jemaat ditentukan oleh Gereja Protestan Indonesia (GPI) melalui keputusan yang diambil dalam rapat GPI pada tahun 1933. Pada masa kepemimpinan para pendeta asal Belanda, pengurus Sinode GMIM memberikan perhatian besar terhadap pembenahan internal organisasi, termasuk pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kesatuan gereja.¹¹

Pada 30 September 1934, GMIM resmi berdiri sebagai gereja mandiri bersinode dengan pusat di Tomohon, diresmikan oleh Gubernur Jenderal Mr. B.C. de Jonge atas mandat Ratu Wilhelmina. Peresmian ini disertai sambutan dari perwakilan Indische Kerk, Sinode GMIM, dan umat Kristen Minahasa.¹² Meski resmi berdiri pada 30 September 1934, GMIM awalnya belum sepenuhnya mandiri karena masih bergantung pada peraturan dan keuangan pemerintah. Namun, atas desakan dari Minahasa dan GPI secara keseluruhan, GMIM kemudian diberi hak untuk mengatur sendiri urusan internalnya,

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), h.3.

⁸ Leni Anggraeni Andewi Afrizal Martin, Dian Puspita, Novi Ayu Kristiana Dewi, Marilyn Kristina, Erliza Septia Nagara, Bernadhita Herindri Samodera Utami, Noca Yolanda Sari, dan Widi, *METODOLOGI PENELITIAN* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), h.31.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186

¹⁰ "Sejarah Singkat GMIM Masuk Minahasa," h.26.

¹¹ Riedel Christian Gosal, *Minaesa Beresa: Suatu Studi tentang Peranan GMIM dalam Gerakan Keesaan di Indonesia Tahun 1934-1980* (CV. Bintang Semesta Media, 2024), h.80.

¹² "Sejarah Singkat GMIM Masuk Minahasa," h.26.

termasuk pengangkatan dan pemberhentian Inlands Leraar, pengelolaan keuangan jemaat, serta penyusunan pengakuan iman sesuai asas Protestan.¹³

Meskipun GMIM telah resmi berdiri sebagai gereja mandiri sejak 1934, kepemimpinannya hingga tahun 1942 masih dipegang oleh pendeta asal Belanda yang merupakan utusan Kerkbestuur dari Indische Kerk, gereja yang berafiliasi dengan pemerintah kolonial.¹⁴ Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 5 Tahun 1934 dan Besluit Pemerintah No. 576 Tahun 1935, GMIM ditetapkan sebagai gereja yang berdiri sendiri namun tetap menjadi bagian dari Gereja Protestan di Hindia Belanda. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Umum GMIM pasal 1 ayat 1. Meski telah mandiri secara administratif, kepemimpinan GMIM pada periode 1934–1942 masih berada di tangan pendeta Belanda utusan Kerkbestuur. Selama delapan tahun, posisi Ketua Sinode GMIM dijabat oleh:

- 1934–1935: Ds. Ernst Anton Adriaan de Vreede.
- 1936–1937: Ds. Carl Diederich Buenk.
- 1937–1941: Ds. Henri Herman van Herwerden.
- 1941–1942: Ds. Gerrit Paul Henrik Locher.¹⁵

Pada masa kepemimpinan Belanda, GMIM mendapatkan dukungan dan pertolongan dari GPI dan sokongan uang dari pemerintah termasuk uang untuk gaji pegawai. Walaupun pada akhirnya terjadinya pemisahan secara administratif pada masa GMIM diketuai oleh Ds. C.D. Buenk pemisahan ini terjadi agar gereja mandiri dan terlepas dari pengaruh negara.

Maka dari itu GMIM dalam masa kepemimpinan Belanda menggambarkan bagaimana oleh John Calvin pada pandangannya mengenai hubungan gereja dan negara, bahwa pemerintah wajib takluk kepada pemerintahan Allah, yang diberitakan oleh gereja. Namun hal ini tidak berarti bahwa gereja harus memerintah negara tetapi pemerintah negeri wajib melindungi dan memajukan gereja yang benar sambil memerangi agama yang palsu.¹⁶

GMIM Pada Pemerintahan Jepang 1942-1945

Pendudukan Jepang di tanah Minahasa (1942-1945) menjadi masa sulit bagi kehidupan bergereja. Pada periode ini, pemerintahan militer Jepang menutup berbagai bentuk aktivitas keagamaan GMIM, termasuk pelarangan ibadah dan penutupan gereja-gereja local. Saat itu, GMIM baru berusia 8 tahun sejak pendiriannya pada tahun 30 September 1934 dan sedang mengalami perkembangan kelembagaan. Namun, pendudukan militer Jepang dimulai pada bulan Januari di wilayah Minahasa dan Manado, kemudian mencapai pusat kota Tomohon, yang merupakan pusat administrasi GMIM, pada 12 Juni 1942.¹⁷

Pemerintahan militer Jepang menahan pendeta-pendeta yang berkebangsaan Jerman dan Belanda agar tidak menjalankan tugas pemberberitaan Injil. Masyarakat yang berada di

¹³ D.M. Lintong, *Apakah Engkau Mengasihi Aku? Sejarah GMIM Jilid 1* (Tomohon: Unit Percetakan Sinode GMIM, 2004).

¹⁴ "Sejarah GMIM Masuk Minahasa," t.t., h.26, Arsip GMIM.

¹⁵ "Sejarah GMIM Masuk Minahasa," h.26.

¹⁶ Hendrikus Berkhof, *Sejarah gereja* (BPK Gunung Mulia, t.t.), h.177.

¹⁷ *Sejarah Jemaat GMIM Sion Tomohon* (Tomohon, 2014), h.25.

Kota Tomohon mencari tempat pengungsiang, pendeta-pendeta yang bertugas di GMIM bersama dengan keluarga mereka ditawan oleh Jepang, gereja pusat di Kota Tomohon ditutup bahkan jemaat serta masyarakat dilarang untuk berkumpul dan beribadah.¹⁸

Menghadapi tekanan dari pemerintah militer Jepang, GMIM, melalui pemimpin sinodenya, mengupayakan audiensi resmi dengan otoritas Jepang di Manado. tujuan pertemuan ini adalah menjelaskan peran dan fungsi gereja serta menyampaikan permohonan khusus terkait kebebasan beragama, yakni permohonan agar GMIM memperoleh kembali hak menjalankan ibadah dan kebebasan melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan gerejawi.¹⁹

Permohonan tersebut diajukan secara langsung oleh ketua sinode GMIM saat itu, Ds.A.Z.R. Wenas. Pemerintah Jepang mengabulkan permohonan tersebut dengan sejumlah syarat. GMIM diminta untuk tidak menjalankan Tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum, serta tidak memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang bertentangan dengan kepentingan Jepang. Sebagai imbal balik atas izin beribadah, gereja juga diharapkan menyokong agenda Jepang di Asia Timur Raya secara moral. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Jepang, kabar ini disampaikan kepada jemaat, dan kegiatan ibadah serta pelayanan gereja secara bertahap mulai diaktifkan kembali, meskipun dalam pengawasan ketat militer.²⁰

Meskipun ibadah telah diizinkan kembali secara terbatas, tekanan dari otoritas pendudukan Jepang tetap terasa dalam kehidupan bergerja dan sosial jemaat GMIM. Ujian terhadap keteguhan iman jemaat semakin berat ketika tentara Jepang melarang pengumpulan persembahan (derma) dalam kegiatan ibadah melalui surat edaran resmi. Selain itu, pelajaran agama Kristen di sekolah-sekolah ditiadakan, digantikan oleh Pendidikan moral Jepang. Setiap sekolah juga diwajibkan untuk melaksanakan senam Taiso, sebuah program kebugaran khas Jepang dan membungkuk sikap *saikare*, yaitu membungkuk ke arah Tokyo sebagai bentuk penghormatan terhadap kaisar, yang secara ideologis dianggap sebagai figure ilahi dalam sistem negara Jepang saat itu.²¹

Di tengah tekanan militer, GMIM tidak menyerah dan terus melakukan tugas pengembalaan terhadap Jemaat GMIM agar tetap setia. Secara parallel, GMIM juga berupaya menjalin komunikasi dan membangun hubungan diplomatis dengan otoritas pendudukan Jepang, dan khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan keberlangsungan aktivitas keagamaan di Minahasa. Maka diutuslah Pdt. W.J. Rumambi, Pdt. J.E. Tulung dan Pdt. R.M. Luntungan diutus oleh sinode GMIM bekerja di Minsebu urusan ibadah dan pengajaran Jepang di Manado, hal ini dilakukan untuk membujuk dan melembutkan hati pemerintah Jepang agar memberikan kelonggaran kepada jemaat untuk boleh dapat melaksanakan kegiatan keagamaan.²²

Akhirnya Ketua Sinode GMIM berusaha bertemu dengan pemerintah Jepang, dan akhirnya Jepang memberikan kesempatan bagi GMIM untuk bisa kembali menjalankan tugas gereja, termasuk didalamnya yaitu usaha-usaha gereja dalam mencari dana untuk menghidupi dan

¹⁸ *Sejarah Jemaat GMIM Sion Tomohon*, h.25.

¹⁹ "Ds. A.Z.R Wenas 1897-1967 Pelajar Gereja di Minahasa," t.t., h.20, Arsip GMIM.

²⁰ *Sejarah Jemaat GMIM Sion Tomohon*, h.27.

²¹ *Sejarah Jemaat GMIM Sion Tomohon*, h.27.

²² *Sejarah Jemaat GMIM Sion Tomohon*, h.28.

memenuhi tanggungjawab gereja mandiri. GMIM juga menolak bantuan dari pemerintah Jepang dalam hal pemberian dana gaji pegawai gereja.²³

Pada tahun 1945 Jepang menyerah kepada sekutu, para pendeta Belanda dibebaskan dari tahanan. GMIM menggelar ibadah syukur yang juga bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-11 berdirinya GMIM sebagai gereja mandiri. Ibadah syukur ini memiliki makna istimewa karena mempertemukan para pendeta Belanda, Jepang dan Minahasa dalam satu kebaktian bersama.²⁴

Era Kemerdekaan 1945-1956

Menjelang akhir tahun 1945, GMIM mulai menjalin kembali relasi institusional dengan GPI, antara lain melalui kehadiran kembali para pendeta Belanda yang sebelumnya ditawan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Namun, kembalinya para pendeta Belanda justru memicu semangat nasionalisme di kalangan masyarakat dan tokoh-tokoh Minahasa, yang memandang kehadiran mereka sebagai bentuk keberlanjutan dominasi kolonial dalam tubuh gereja. Semangat kemerdekaan yang menguat di tengah masyarakat menyebabkan munculnya penolakan terhadap dominasi dan kepemimpinan Belanda dalam struktur gereja, baik secara eksplisit melalui pernyataan sikap maupun dalam bentuk ketegangan internal sinode.²⁵

Sebagai respons terhadap dinamika sosial-politik pasca-kemerdekaan, GMIM melalui keputusan sidang sinodenya menegaskan bahwa keberadaan dan kontribusi para pendeta Belanda masih dianggap penting dalam menopang pelayanan dan pembinaan jemaat. Dalam pernyataannya, GMIM menegaskan pentingnya menjaga kesatuan gereja dalam Kristus, sekaligus mengafirmasi identitasnya sebagai gereja yang tumbuh dari dan berakar pada semangat kebangsaan Indonesia pasca-kemerdekaan. Kendati semangat nasionalisme tengah menguat di berbagai lapisan masyarakat, GMIM tetap menunjukkan sikap terbuka dan menjunjung tinggi semangat persatuan dalam tubuh Kristus, termasuk melalui kerja sama pelayanan dengan para pendeta Belanda yang masih hadir pada masa itu.²⁶

Setelah Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 19 Desember 1949, pemerintah Republik Indonesia mulai menerapkan kebijakan pemisahan keuangan antara gereja dan negara. Salah satu implikasinya adalah penghentian subsidi pemerintah kolonial terhadap lembaga keagamaan, termasuk GMIM. Kebijakan ini mendorong GMIM untuk semakin mandiri secara finansial dan organisatoris.²⁷

Sekitar tahun 1954, Minahasa diwarnai isu komunisme dan ancaman negara Islam. Propaganda komunis menyebar lewat pemuda, pegawai, dan media, sementara ketimpangan sosial mendorong sebagian masuk Partai Komunis. Kekacauan pemerintahan dan kekecewaan

²³ “Ds. A.Z.R Wenas 1897-1967 Pelajan Gereja di Minahasa,” t.t., h.21, Arsip GMIM.

²⁴ Riedel Ch Gosal, “Sejarah Ekumene GMIM Tahun 1934-1980,” *Titian Emas* 1, no. 1 (11 Juli 2020): 73–98.

²⁵ Gosal, h.88.

²⁶ Gosal, h.89.

²⁷ Jonely Ch. Lintong, *Satu Bab Sejarah GMIM Uraian Historis tentang Tata Gereja 1934-1981*, 1986, h.58.

terhadap gereja membuat pemuda mudah terpengaruh. Masyarakat merasa kemerdekaan tidak membawa perbaikan hidup, dan menilai pemerintah serta gereja hanya memberi janji kosong.²⁸

Menanggapi keadaan itu Badan Pekerja Sinode GMIM, dalam pernyataan yang dikeluarkan pada tahun 1954, antara lain mengatakan:

- Gereja menolak ajaran-ajaran yang dikandung oleh komunisme sebagai suatu ideologi, oleh karena tafsiran komunisme mengenai manusia dan bertentangan dengan Alkitab
- Tuhan menghendaki agar supaya manusia memperoleh kehidupan, kemerdekaan, kebenaran, keadilan dan perdamaian
- Gereja memberitakan kabar keselamatan dan mempunyai tugas untuk menciptakan masyarakat yang bertanggungjawab akan ketertiban umum apalagi bagi mereka yang mempunyai kedudukan didalam bidang pemerintahan.
- Gereja semua menolak semua hal yang menyangkut kepentingan politik termasuk mengorbankan ideologi gereja bahkan mengorbankan seseorang untuk kepentingan politik.²⁹

GMIM Pada Masa PERMESTA 1957-1961

Dengan diproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang (Sumatera) maka pada 2 Maret 1957 tokoh-tokoh militer dan sipil di Manado menyatakan searah dengan pernyataan PRRI itu. Dari tahun 1957-1961 terkenal sebagai periode Permesta dan selang itu terbentuklah suatu pemerintahan sipil dan militer yang taat pada pemerintah Republik Indonesia. Di Jakarta timbul dua kekuatan yang saling menyerang satu sama lain ialah yang mendukung PERMESTA dan yang menolak PERMESTA. Selama periode ini tantara pusat dan tantara PERMESTA saling menyerang dengan tembakan dan bom. Tidak kurang dari 150 desa di tanah Minahasa mengalami kerusakan karena kedua pihak tersebut. masyarakat mengungsi karena peperangan dan pertikaian menggunakan senjata terjadi bahkan ada Tindakan penculikan.³⁰

GMIM turut mengalami akibat dari perang ini bahkan anggota-anggota samapi majelis gereja, turut menyelamatkan diri dengan mengungsi pada masa itu. Namun, walaupun ada dalam situasi yang mencekam tersebut jemaat tetap menjalankan kebaktian atau perhimpunan walaupun tidak ditempat yang seharusnya. Pertikaian ini terus berjalan sampai pada 1959, dan sampai saat itu juga rakyat terus mengamankan diri dan mengungsi sampai ke Minahasa Selatan bahkan sampai ke wilayah Bolaang Mongondow.³¹

Merespon akan kejadian yang terjadi di tanah Minahasa bahkan GMIM, pada 12 Maret 1958 Badan Pekerja Sinode GMIM membuat seruan yaitu :

²⁸ Arnold Fr. Parengkuan, *The Presence, Place and Role of The Christian Evangelical Church in Minahasa in The Midst of The Struggle of The Minahasa Society and Indonesian Nation In The Period of 1934-1979*, h.199.

²⁹ Arnold Fr. Parengkuan, *The Presence, Place and Role of The Christian Evangelical Church in Minahasa in The Midst of The Struggle of The Minahasa Society and Indonesian Nation In The Period of 1934-1979*, h.200.

³⁰ "Ds. A.Z.R Wenas 1897-1967 Pelajan Gereja di Minahasa," h.35.

³¹ "Ds. A.Z.R Wenas 1897-196 7 Pelajan Gereja di Minahasa," h.35.

“Tinggalkanlah dan hentikanlah djalan kekerasan, melalui pemboman, perang saudara antara kita dengan kita. Hentikanlah pemuntahan peluru dan granat pada kota Manado dan kota-kota yang lain yang telah mengakibatkan tewasnja orang-orang jang tiada bersalah. Ganti penjelesaian persengketaan dengan kapal perang dan peesawat pembom, dengan mengangkat perang dan serangan-serangan yang seru dan hebat kami desak pada pemerintah akan menjtari djalan lain guna penyelesaian untuk keutuhan negara dan bangsa kita. Sekali lagi kami tegaskan bahwa adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah daerah kita Minahasa dan daerah-daerah lain jang sebagian besar penduduknya adalah beragama Kristen lain jang sebahagian oleh prang saudara”.

Pada 4 April 1958, Ketua Sinode GMIM, Ds. A.Z.R. Wenas menyampaikan dua pidato penting di hadapan jemaat dan pemangku kepentingan, terkait upaya penyelesaian konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pidatonya, Ds. Wenas menegaskan pentingnya pendekatan damai dan menyarankan agar sengketa antara pemerintah pusat dan daerah diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan kekerasan, sejalan dengan panggilan gereja untuk menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Pada 5 Mei 1958, Badan Pekerja Sinode GMIM menyerukan kepada seluruh jemaat untuk mengadakan doa syafaat bagi pemulihan bangsa, dengan dasar firman Tuhan dari 2 Tawarikh 7:14.

Dalam situasi krisis akibat perang, Ketua Sinode GMIM, Ds. A.Z.R. Wenas secara aktif menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh pemerintahan sipil dan militer guna mengupayakan bantuan dan meringankan penderitaan masyarakat. Pada masa itu, kendaraan milik Sinode GMIM yang digunakan untuk pelayanan disita oleh pihak militer. Sebagai bentuk keteguhan dalam pelayanan pastoral, Ds. Wenas tetap melakukan kunjungan jemaat dengan menunggangi kuda. Pada Mei 1959, kendaraan tersebut akhirnya dikembalikan kepada GMIM, sebagai hasil dari pendekatan yang terus dilakukan oleh pimpinan Sinode dalam menjaga hak dan martabat gereja di tengah situasi militeristik.³²

Sebagai respons terhadap situasi yang terjadi di tanah Minahasa, Badan Pekerja Sinode GMIM mengupayakan berbagai bentuk bantuan, baik dari wilayah Minahasa maupun dari luar daerah. Bantuan tersebut meliputi makanan, obat-obatan, pakaian, dana, buku, dan bacaan rohani, yang ditujukan untuk membantu pemulihan kehidupan jemaat dan masyarakat yang terdampak langsung oleh konflik bersenjata.³³

Gereja khususnya GMIM, berperan aktif dalam upaya perdamaian antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan gerakan PERMESTA. Peran ini dijalankan melalui kepemimpinan ketua sinode GMIM saat itu Ds. A.Z.R. Wenas. Pada Januari 1960, Ds. A.Z.R. Wenas mengadakan pertemuan dengan tokoh PERMESTA, Yoop Warouw, di Romboken, untuk menawarkan solusi damai dan mendorong rekonsiliasi dengan pemerintah Republik Indonesia. Kepada pihak pemerintah, khususnya kepada Presiden Soekarno, Ds. Wenas

³² “Sejarah GMIM Masuk Minahasa,” h.34.

³³ “Sejarah GMIM Masuk Minahasa,” h.37.

menyampaikan seruan kenabian yang menekankan pentingnya pendekatan damai untuk menyelesaikan konflik.³⁴

Pada akhir peperangan yaitu pada tahun 1961, GMIM melakukan berbagai kegiatan untuk mendirikan rumah sekolah darurat, gereja darurat, rumah sakit dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh jemaat dan masyarakat Minahasa yang terkena dampak peperangan.

GMIM dan PKI 1962-1965

Pada tahun 1962, Ds. A.Z.R. Wenas mengupayakan realisasi visinya untuk meningkatkan kesejahteraan rohani dan sosial rakyat Minahasa melalui kehidupan yang berlandaskan pada ketaatan kepada Yesus Kristus. Ia menilai bahwa jemaat perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang penginjilan, sekaligus pendampingan rohani yang berkelanjutan bagi mereka yang telah lebih dahulu mengenal Injil. Sebagai bagian dari strategi penginjilan GMIM, ia mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi para pendeta, yang diharapkan memiliki integritas, kedalaman iman, dan dedikasi tinggi dalam pelayanan. Bersama dengan Badan Pekerja Sinode, ia mendirikan Perguruan Tinggi Theologia GMIM pada 7 Oktober 1962 sebagai wujud konkret dari komitmen GMIM terhadap pendidikan teologi yang kontekstual dan berkelanjutan. Untuk mengatasi kekurangan tenaga pelayanan, GMIM juga mengutus pelayan gereja ke berbagai wilayah misi, seperti Gorontalo, Buol Toli-Toli, dan Palu Donggala.³⁵

Pada tahun 1964, pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI), yang dikenal memiliki sikap kritis bahkan antagonis terhadap institusi keagamaan, semakin terasa di Minahasa. Kedua partai tersebut diduga berupaya memengaruhi GMIM melalui pendekatan kepada Ds. A.Z.R. Wenas, sehingga ia kemudian menjadi sasaran tuduhan dan upaya delegitimasi oleh kelompok-kelompok yang menentang gereja. Ketegangan mencapai puncaknya dalam peristiwa “Pidato Perayaan 30 September GMIM 1964” di mana Ds. Wenas menyampaikan sejarah GMIM termasuk menyebut peran pemerintah Belanda dalam proses pendirian gereja tersebut. Pidato tersebut kemudian dipolitisasi oleh pihak-pihak yang berafiliasi dengan PKI, dan informasi itu disampaikan kepada Panglima Kodam XIII Merdeka, yang merespons dengan menuduh GMIM dan Ds. Wenas sebagai “antek imperialis.” Tuduhan tersebut berdampak negatif pada hubungan GMIM dengan institusi militer, yang sebelumnya terjalin dalam kerja sama sosial-keagamaan di Minahasa. Namun, pada Februari 1965, ketegangan mulai mereda setelah Brigadir Jenderal Sunandar mengadakan pertemuan dengan Ds. Wenas dan pimpinan GMIM di Gereja Sion Tomohon. Dalam pertemuan tersebut, Brigjen Sunandar menegaskan bahwa niatnya bertemu para pemimpin rohani GMIM bukan berkaitan dengan kontroversi masa lalu, melainkan sebagai pengakuan terhadap peran signifikan gereja dalam sejarah perjuangan bangsa dan pembangunan moral masyarakat.³⁶

³⁴ Phill M. Sulu, *Permesta Dalam Romantika, Kemelut, & Misteri* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.179.

³⁵ “Sejarah GMIM Masuk Minahasa,” h.40.

³⁶ “Sejarah GMIM Masuk Minahasa,” h.41.

Ds. A.Z.R. Wenas dikenal sebagai pemimpin gereja yang bersikap tegas terhadap pemerintah, terutama dalam mempertahankan independensi gereja dalam urusan internalnya. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa negara dan gereja memiliki batas yurisdiksi serta cara yang berbeda, di mana gereja berlandaskan pada mandat rohani dan firman Tuhan, sedangkan negara bergerak berdasarkan mandat konstitusi dan hukum positif. Menurutnya pandangannya, pada masa kemerdekaan, posisi gereja dalam menghadapi pemerintah justru melemah dibandingkan sebelum tahun 1950, baik dalam keberanian menyuarakan kebenaran maupun dalam mempertahankan otonomi kelembagaannya. Pada tahun 1964, ia diundang oleh pihak terkait untuk membantu menyelesaikan persoalan relasi gereja dan politik. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Sinode GMIM, ia juga diminta untuk menangani isu strategis mengenai “Gereja dan Tugas Keesaan Gereja”, yang berkaitan dengan panggilan gereja untuk memelihara kesatuan iman di tengah tantangan ideologi dan politik.³⁷

Pada tahun 1965, Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) resmi berdiri sebagai bagian dari visi strategis Ds. A.Z.R. Wenas untuk memperkuat pendidikan tinggi Kristen di Minahasa dan mendukung peningkatan kesejahteraan rohani, intelektual, dan sosial masyarakat setempat. Proses pendirian UKIT merupakan hasil kolaborasi antara GMIM, gereja-gereja mitra baik dari dalam maupun luar negeri, serta dukungan pemerintah, dengan Prof. Dr. Med. S.J. Warouw memimpin secara langsung tim pendirian dan menyusun fondasi akademik universitas tersebut.³⁸

Di tengah rasa syukur atas berbagai kemajuan pelayanan dan pengembangan lembaga gereja, Ds. A.Z.R. Wenas menyatakan keprihatinannya karena sebagian jemaat GMIM tampak lebih fokus pada aktivitas politik ketimbang pada kehidupan bergereja. Ia menyesalkan bahwa sebagian melihat jemaat lebih memilih menjadi instrumen kepentingan politik daripada menjalankan perannya sebagai saksi Kristus di tengah masyarakat. Menjelang dan sesudah peristiwa G30S/PKI, ia menghadapi kesulitan dalam membina jemaat di Tondano yang keterlibatan politiknya sangat intens, sehingga mengganggu konsentrasi mereka pada pelayanan dan kehidupan iman. Sebagai pemimpin dan gembala, Ds. Wenas merespons situasi tersebut dengan doa dan pelayanan pastoral yang berlandaskan Firman Allah, menekankan pemulihan rohani, pembinaan iman, dan penguatan kesaksian Kristen di tengah gejolak politik.³⁹

Pada masa pecahnya peristiwa G30S/PKI, telah memiliki landasan sikap yang jelas terhadap paham komunisme melalui keputusan Sidang Sinode Oktober 1961. Keputusan tersebut menetapkan bahwa anggota jemaat atau pelayan yang menganut paham komunisme tidak diperkenankan menduduki jabatan kepemimpinan di dalam gereja, meskipun masih diizinkan untuk terlibat dalam pelayanan tertentu. Situasi politik pada tahun 1965 semakin mendorong GMIM untuk menata pelayanan secara lebih teguh dan terstruktur, guna menjaga kemurnian ajaran dan menghindari pengaruh ideologi yang bertentangan dengan iman Kristen.⁴⁰

³⁷ “Sejarah GMIM Masuk Minahasa,” h.41.

³⁸ “Sejarah GMIM Masuk Minahasa,” h.42.

³⁹ “Sejarah GMIM Masuk Minahasa,” h.42.

⁴⁰ D.M. Lintong, *Apakah Engkau Mengasihi Aku? Sejarah GMIM Jilid 1*, h.20.

Pascakonflik 1966-1967

Hubungan GMIM dan pemerintah berlanjut dalam Sidang Sinode GMIM pada 25 Oktober 1967, yang dipimpin oleh Ds. W.A. Roeroe dan dihadiri Letkol Ds. H.F. Mamesah dari Pusat Rohani Konstrad. Sidang membahas pentingnya pelayanan rohani di lingkungan Angkatan Darat (AD), terutama pasca G30S/PKI ketika banyak orang mencari pegangan hidup dan beralih ke Kristen. Ds. Mamesah menyampaikan bahwa sekitar 10% anggota AD adalah Kristen, namun kekurangan pendeta. Ia mengusulkan agar guru agama yang telah lama melayani dapat ditahbiskan sebagai pendeta setelah dinilai selama dua tahun.⁴¹

Rapat juga membahas kepangkatan dan masa tugas pendeta militer. Ds. Mamesah mengusulkan batas pensiun tetap pada usia 55 tahun untuk menjaga regenerasi, menolak usulan Pusroh AL yang ingin memperpanjang hingga 60 tahun. Ia juga mendorong agar pendeta militer bisa naik pangkat hingga Mayor Jenderal guna memperkuat pelayanan rohani di militer. Selain itu, dibahas Komisi Pelayanan Rohani Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI, sekarang Tentara Nasional Indonesia/TNI) yang dibentuk Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI, sekarang Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia/PGI), dan diusulkan agar GMIM mengutus seorang pendeta militer sebagai sekretaris komisi tersebut untuk mewakili GMIM secara struktural dan oikumenis.⁴²

Rapat juga menyoroti masalah yang dihadapi guru agama, seperti gaji rendah, status tidak jelas, dan lambannya pengangkatan oleh Pusroh. Ds. Mamesah menekankan perlunya dukungan gereja, termasuk pendidikan teologi empat tahun dengan pelatihan militer. Ia menegaskan bahwa pelayanan pendeta militer harus sesuai dengan liturgi masing-masing gereja. Rapat menyimpulkan bahwa GMIM perlu lebih aktif mendukung pelayanan rohani di ABRI melalui pengutusan pendeta, pendidikan calon pendeta militer, dan kerja sama oikumenis dengan DGI dan denominasi lain.⁴³

Hubungan GMIM dan Pemerintah

Penelitian ini menemukan bahwa hubungan Kerjasama GMIM dan pemerintah harus tetap ada dan dalam keadaan yang baik dari masa ke masa.⁴⁴ Dari perspektif pemerintahan juga memandang gereja sebagai mitra kerja pemerintah dalam membangun penduduk terlebih khusus yang erada di Sulawesi Utara.⁴⁵ Bagi salah satu informan yang merupakan seorang teolog memberi pendapat dengan perspektif Alkitab bahwa dan tokoh reformasi yaitu John Calvin bahwa orang-orang percaya tertama dari sisi Lembaga harus bekerjasama dan orang-orang gereja adalah orang-orang pemerintah karena iman bukan hanya ada diruang lingkup gereja tetapi juga ada di ranah publik. Gereja harus bekerjasama dengan pemrintah seperti nasihat dari rasul Paulus dalam Roma 13:1-5.⁴⁶ Relasi GMIM dan pemerintah dalam membangun sinergitas

⁴¹ "Notulen Rapat Badan Pekerja Sinode GMIM," 1967.

⁴² "Notulen Rapat Badan Pekerja Sinode GMIM."

⁴³ "Notulen Rapat Badan Pekerja Sinode GMIM."

⁴⁴ AOS. Wawancara, 25 April 2025.

⁴⁵ SBANL. Wawancara 9 Maret 2025

⁴⁶ HWBS. Wawancara, 10 Maret 2025

terjalin dengan baik dalam mendukung program masing-masing karena warga gereja juga adalah warga masyarakat.⁴⁷

Namun, Menjadi hal yang harus dipentingkan adalah sinergitas, gereja harus menjaga integritas, jati diri dan citra gereja. Artinya gereja jangan sampai terbawa kepada hal-hal yang menjerumuskan sebaliknya pemerintah yang didalamnya terdapat juga warga gereja agar tidak memanfaatkan gereja kepada hal-hal yang tidak sesuai apalagi mengarahkan gereja kepada politik praktis.⁴⁸

Faktor yang mempengaruhi Kerjasama GMIM dan Pemerintah

Kerjasama dan hubungan GMIM dan pemerintah bisa terjalin disebabkan karena informan merasa bahwa segala program pemerintah bahkan pun rencana dan kegiatan dari gereja maupun pemerintah semuanya membutuhkan bantuan dari satu sama lain, karena sebagian besar dari masyarakat Sulawesi Utara adalah jemaat GMIM maka program pemerintah jika tidak ada dukungan bahkan edukasi dari pemimpin GMIM kepada jemaatnya, maka program tersebut juga tidak bisa dijalankan. Sebaliknya juga GMIM membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam hal menjaga ketertiban ketika ada kegiatan gereja bahkan pemerintah secara aktif melakukan dialog antar umat Bergama guna mencapai kesejahteraan dan kedamaian antar umat beragama. Jadi Kerjasama ini dapat terjadi faktor utamanya ialah saling membutuhkan dan menopang satu dengan yang lainnya.⁴⁹ Pemerintah dan gereja berdiri masing-masing pada tugasnya sendiri. gereja sangat menghargai pemerintah dan pemerintah sangat menghargai gereja Dan membuat membuat hal-hal menurut tanggung jawab masing-masing. Pemerintah membantu dalam hal pembangunan gereja dan begitupula gereja membantu ketika ada tugas gotong royong dalam segala program pemerintah. Mengambil bagian dan partisipasi aktif melaksanakan program pemerintah dimasyarakat.⁵⁰

Hubungan gereja dan pemerintah dipengaruhi faktor teologis dan historis. Yesus mengajarkan ketaatan kepada pemerintah, bukan sikap anti, bahkan meluas pada aturan-aturan hidup bersama. Dalam Alkitab, Tuhan memakai pemerintah sebagai alat untuk menata umat-Nya, baik pada masa Perjanjian Lama (Babilonia, Asyur) maupun Perjanjian Baru (ajaran Yesus dan Paulus). Bagi GMIM, sejak berdiri sudah terjalin kerja sama dengan pemerintah. Jadi, dasar hubungan ini bukan hanya historis, tetapi juga teologis.⁵¹

Gereja Terhadap Pemerintah dan Pemerintah Terhadap Gereja

Pemerintah dan gereja harus saling bekerjasama membantu apabila ada program-program pemerintah yang belum berhasil ketika dilaksanakan dalam jalur pemerintahan maka gereja bisa membantu pemerintah dalam melaksanakan program tersebut dengan memberikan didikan politik bagi warganya yaitu dengan menghimbau jemaat untuk menaati peraturan

⁴⁷ SBANL, Wawancara 9 Maret 2025

⁴⁸ SBANL, Wawancara, 9 Maret 2025

⁴⁹ HW, Wawancara 16 Maret 2025

⁵⁰ AOS, Wawancara, 25 April 2025

⁵¹ PYR, Wawancara 7 Juni 2025.

pemerintah dan menghindari segala macam hal negatif yang menyangkut kepentingan pemerintahan yaitu korupsi dan suap.⁵² Pemerintah dan gereja masing-masing berdiri tegak pada tugas masing-masing. Gereja sangat menghargai pemerintah dan pemerintah sangat menghargai gereja. Dan membuat membuat hal-hal menurut tanggung jawab masing-masing. Pemerintah membatu dalam hal pembangunan gereja dan begitupula gereja membantu ketika ada tugas gotong royong dalam segala program pemerintah. Mengambil bagian dan partisipasi aktif melaksanakan program pemerintah dimasyarakat.⁵³

Dampak Kerjasama GMIM dan Pemerintah

Menurut para informan bahwa dampak dari hubungan GMIM dan Pemerintah baik, entah itu untuk masyarakat maupun jemaat Dampak dari Kerjasama ini selalu positif, tetapi bagaimana kita sebagai gereja yang mengambil bagian dalam partisipasi diprogram pemerintah, kalau Kerjasama ini salah dipergunakan, akan mengakibatkan hal yang salah pula. Semua dampak dari Kerjasama ini adalah positif jika dilaksanakan dengan baik, jangan menyalahgunakan program pemerintah⁵⁴

Uraian GMIM di Masa Kini

Gereja Masehi Ijili di Minahasa adalah perwujudan dari karakter Kristus yang adalah kepala gereja yang mencerminkan bagaimana karakter Kristus sebagai orang-orang pilihan-Nya yaitu penuh kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran (Kolose 3:12), sehingga dalam kehidupan manusia dilembaga apapun, ia akan memegang teguh sifatnya yang berdasarkan karakter Kristus. GMIM pada masa kini yang membawa amanat Agung untuk memberitakan Injil dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja, maka juga GMIM terpanggil utuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tanah Minahasa, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945⁵⁵. Maka dari itu sesuai dengan Tata Gereja GMIM tahun 2021 bahwa GMIM terpanggil untuk mengadakan hubungan gerejawi baik didalam maupun di luar negeri dalam segala bentuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GMIM dan Alkitab bahkan termasuk juga dengan Lembaga Pemerintahan dan masyarakat asalkan itu tidak bertentangan dengan Alkitab dan Tata Gereja GMIM.

Pada masa kini yang semakin kental dengan teknologi informasi, segala hal yang berhubungan dengan Kerjasama GMIM selalu dapat disoroti dan dilihat oleh Jemaat dan masyarakat. Pada keadaan seperti masa kini, hal itu sering menjadi pertentangan apalagi ketika GMIM bekerjasama dengan pemerintah, maka dari itu gereja masa kini perlu mewujudkan Kerjasama yang sehat yang berdasarkan akan takut akan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2:13 “Tunduklah karena Allah, kepada semua Lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi”, jadi bisa diartikan dan dikaitkan dengan kehidupan masa kini bahwa, jemaat dan masyarakat karena Tuhan Allah percaya akan utusan Allah dalam

⁵² SBANL. Wawancara, 9 Maret 2025

⁵³ AOS, Wawancara, 25 April 2025

⁵⁴ AOS, Wawancara, 25 April 2025

⁵⁵ TATA GEREJA 2021, 1.

Lembaga pemerinthan serta gereja dan kepercayaan diperoleh mereka adalah berkat dari ajaran Allah.

Kejadian dan pengalaman yang dialami oleh GMIM pada masa lampau menunjukkan betapa pentingnya kemandirian gereja. GMIM yang awalnya sangat tergantung pada dukungan pemerintah Belanda, secara bertahap belajar untuk berdiri sendiri secara administratif dan finansial. Hal ini menjadi pelajaran bahwa gereja masa kini harus terus membangun struktur yang mandiri, tidak bergantung pada kekuatan eksternal, dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber dayanya sendiri. Relasi antara gereja dan pemerintah terbukti membawa dampak positif, seperti yang tampak dalam keterlibatan GMIM dalam misi kemanusiaan dan perdamaian, termasuk melalui peran penting Ds. A.Z.R. Wenas pada masa konflik PERMESTA. Ini membuktikan bahwa gereja dan pemerintah dapat saling melengkapi, asalkan hubungan tersebut dibangun atas dasar saling menghargai dan tidak saling memperalat.

GMIM menunjukkan bahwa gereja bukan hanya pelayan di bidang spiritual, tetapi juga agen aktif dalam menciptakan perdamaian dan memulihkan masyarakat di masa konflik. Gereja masa kini dipanggil untuk menjalankan peran sosialnya, hadir sebagai suara moral di tengah masyarakat yang terpecah. Dari ketegasan dan keberanian kepemimpinan seperti yang ditunjukkan oleh Ds. A.Z.R. Wenas, gereja masa kini belajar bahwa kepemimpinan yang berintegritas sangat diperlukan, terutama dalam menjaga batasan dan identitas gereja. Yesus memberikan teladan dalam hal melayani jemaat dalam Markus 10:45 "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang." Pelayanan yang dilakukan oleh Yesus dalam hal melayani ini memberikan teladan bagi gereja masa kini untuk dapat menyuarakan suara kenabian bahkan bagi pemimpin gereja yang berintegritas yang mempertahankan gereja dengan kerohaniannya sama seperti teladan Kristus bahkan teladan dari pemimpin gereja Ds.A.Z.R. Wenas.

Belajar dari pengalaman GMIM di masa lampau dan apa yang telah dibangun oleh pendiri dan pejuang Gereja Masehi Injili di Minahasa. Gereja masa kini harus terus memperkuat pendidikan teologi bagi para pelayan Tuhan agar gereja tetap bertumbuh dalam iman dan pengetahuan yang benar. Menjadi pengingat bahwa GMIM yang kita kenal hari ini adalah hasil dari perjuangan, tantangan, dan pertolongan Tuhan di masa lalu, bahwa Allah mendirikan gereja dengan berbagai tantangannya tetapi Ia tidak mebiarkan gereja itu begitu saja melainkan Ia akan memelihara dan membekalinya dengan Firman-Nya dan berbagai peristiwa yang dialami oleh gereja itu sendiri. GMIM dengan berbagai peristiwa yang dialaminya dapat membekali GMIM untuk melangkah menjadi gereja yang diberkati Allah. Gereja masa kini harus menghargai sejarahnya, bukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai sumber hikmat dalam pelayanan, kebijakan dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin gereja bahkan kebijaksanaan bagi pemimpin gereja bahkan jemaat dalam memandang dan membangun relasi gereja dengan bidang apapun termasuk pemerintahan, untuk supaya gereja dalam hal ini GMIM dapat melangkah ke depan dengan lebih bijaksana dan setia pada panggilan ilahi.

Analisis Kajian Historis Hubungan GMIM dan Pemerintah Tahun 1934-1967

Pada masa awal berdirinya GMIM 1934, hubungan GMIM dan pemerintah sangat erat dikarenakan segala hal yang berhubungan dengan finansial dari GMIM masih di topang oleh pemerintah Belanda, meskipun memang adanya permintaan untuk GMIM dapat berdiri sendiri dan menjadi gereja mandiri, namun pemerintah Belanda masih merasa GMIM belum mampu maka GMIM masih dipimpin oleh ketua sinode dari utusan Belanda sampai pada tahun 1942. Calvin dalam ajarannya menekankan bahwa pemerintah negeri harus melindungi dan memajukan gereja yang benar.⁵⁶ Maka sama dengan pendapat informan yang membawa pendapat Calvin dalam pengertiannya mengenai hubungan gereja dan negara bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah harus bekerjasama tidak terkecuali gereja dan pemerintah juga memberikan keterangan berdasarkan Roma 13:1-5 bahwa setia orang harus patuh kepada pemerintah sebab pemerintah adalah hamba Allah dan berasal dari Allah. Maka dalam uraian sejarah bahwa pemerintah Belanda saat itu sangat peduli dengan pertumbuhan gereja terlebih khusus GMIM, maka mereka tidak akan membiarkan GMIM berdiri sendiri tanpa kesiapan yang matang.

Hubungan GMIM dan pemerintah Belanda menjadi terputus dikarenakan Jepang yang sudah menguasai Indonesia bahkan Minahasa dan sangat berdampak bagi GMIM sebab seluruh harta milik GMIM di rampas, semua ruang gerak GMIM mengalami kelumpuhan sebab pemerintah Jepang menutup semua akses pelayanan dan ibadah GMIM, maka dimasa Jepang GMIM mengalami kesulitan dan keterpurukan. Maka ini sangat berbanding terbalik dengan pendapat Marthin Luther maupun John Calvin untuk dapat memelihara iman gereja dikarenakan pemerintah Jepang tidak mengenal kekristenan dan menganggap bahwa GMIM bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Maka pada masa itu pendeta-pendeta Belanda dan Jerman ditahan oleh Jepang. Pada masa Jepang ini hubungan GMIM dan pemerintah mengalami pasang surut, GMIM berusaha menemui pemerintah Jepang untuk menjelaskan bahwa GMIM adalah Gereja untuk pemberitaan Injil bukanlah untuk hal lain. dan ketika Jepang menyerah pada sekutu pada 1945 maka GMIM sepenuhnya menjadi gereja mandiri karena pada 1 Februari 1950 pemerintah Indonesia pemisahan keuangan gereja dan negara, maka GMIM sepenuhnya menjadi gereja mandiri dan berdiri sendiri.

Namun ketika GMIM sedang berusaha untuk membangun dirinya sebagai gereja mandiri secara administratif bahkan finansial dan mengurus jemaat-jemaatnya sendiri, maka datanglah periode PERMESTA. Pada masa ini terjadi peperangan antar saudara bahkan mengakibatkan masyarakat di Minahasa harus mengungsi sampai ke hutan-hutan, dan tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada GMIM karena kerusuhan yang terjadi, kerusakan fisik terjadi karena pemboman dan baku tembak. Namun disinilah gereja berperan melalui Ds.A.Z.R Wenas dimana ia menjadi salah satu agen perdamaian PERMESTA yang diutus oleh Soekarno pada 1960. Jadi pada dasarnya pemerintah juga membutuhkan gereja sebagai perantara dan pembawa perdamaian maka ini juga yang merupakan faktor mengapa gereja dan negara harus bekerjasama karena pada dasarnya gereja dan pemerintah membutuhkan bantuan satu sama lain⁵⁷. pemerintah membantu dalam hal pembangunan gereja dan begitupula gereja membantu

⁵⁶ Berkhof, *Sejarah gereja*, h.177.

⁵⁷ HW, Wawancara 16 Maret 2025

pemerintah dalam segala program pemerintah termasuk dalam membawa perdamaian ditengah kekacauan.⁵⁸

Setelah perdamaian terjadi maka GMIM melalui Ds.A.Z.R. Wenas dalam memajukan GMIM yang mandiri maka mendirikan suatu instansi Pendidikan untuk membimbing para calon pelayan Tuhan yaitu Perguruan Tinggi Teologia 1962. Pada masa ini GMIM juga mengalami suatu permasalahan dimana ada pengaruh dari PKI dan PNI yang anti gereja, mereka berupaya untuk mempengaruhi GMIM dan memperalat GMIM namun sebagai ketua sinode GMIM Ds.A.Z.R. Wenas mempertahankan GMIM sehingga Ds.Wenas dikenal tegas kepada pemerintah. Ds. A.Z.R. Wenas berusaha menjaga integritas GMIM dan membuat Batasan antara GMIM dan pemerintah, Batasan dan integritas ini dibahas juga oleh informan bahwa gereja harus menjaga integritasnya, citranya yang bertugas mengabarkan Injil⁵⁹. Maka John Calvin bahwa gereja harus berhati-hati supaya jangan terlanjur pada tuntutan dan kemauan negara⁶⁰ tanggung jawab gereja dan pemerintah adalah saling melengkapi bukan menyaingi ataupun menjatuhkan apalagi memperalat.⁶¹

Ketika masuk pada tahun terakhir kedudukan Ds.A.Z..R. Wenas yaitu 1966-1967 hubungan GMIM dan pemerintah baik dan saling menjalin komunikasi dan masukkan satu sama lain, ditandai dengan adanya pembahasan dari ABRI bahwa pentingnya pelayan rohani di lingkungan ABRI agar dapat memelihara iman dalam lingkungan ABRI pasca perang yang beberapa kali melanda terutama setelah G30S/PKI banyak yang mencari pegangan hidup dan memilih Kristen maka imannya harus dijaga. maka inilah yang terjadi jika hubungan GMIM dan pemerintah berjalan dengan baik maka akan menghasilkan dampak yang baik juga bagi kehidupan orang Kristen.⁶²

Bagi berlangsungnya gereja masa kini, hubungan GMIM dan pemerintah pada tahun 1934-1967 menjadikan GMIM gereja yang dikenal oleh jemaat saat ini dikarenakan jika tidak ada peristiwa-peristiwa itu maka kemungkinan GMIM tidak akan berdiri sekarang jika Belanda tidak memfasilitasi dan jemaat bahkan pimpinan gereja tidak akan dapat mengetahui bahwa gereja harus menjaga Batasan dari pemerintah jika tidak ada kejadian PKI dan PNI dan jemaat tidak akan tahu bahwa GMIM dengan susah payah mempertahankan finansial gereja ketika pemisahan keuangan gereja dan negara. Maka segala peristiwa yang terjadi membawa GMIM sampai pada saat ini. Maka hal ini dapat diingat bahwa GMIM bisa menjadi GMIM karena peristiwa masa lampau yang dilalui.

KESIMPULAN

Hubungan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dan pemerintah pada periode 1934 hingga 1967 menunjukkan dinamika yang kompleks namun penting dalam membentuk jati diri dan kemandirian GMIM. Pada awal berdirinya tahun 1934, GMIM sangat bergantung kepada pemerintah kolonial Belanda, baik dalam hal finansial maupun kepemimpinan. Meskipun ada harapan untuk kemandirian, Belanda belum percaya GMIM mampu berdiri sendiri sehingga

⁵⁸ AOS, Wawancara, 25 April 2025

⁵⁹ SBANL. Wawancara 9 Maret 2025

⁶⁰ Berkhof, *Sejarah gereja*, h.177.

⁶¹ Alister E. McGrath, *Sejarah Pemikiran Reformasi*, h.282.

⁶² AOS, Wawancara, 25 April 2025

kepemimpinan tetap berada di tangan utusan Belanda sampai tahun 1942. Pendudukan Jepang membawa keterpurukan bagi GMIM, dengan penyitaan aset dan pelarangan aktivitas gereja. Pengalaman ini menjadi titik balik penting dalam perjuangan GMIM menuju kemandirian. Setelah kemerdekaan Indonesia dan pemisahan keuangan gereja dan negara pada tahun 1950, GMIM mulai benar-benar berdiri sendiri, baik secara administratif maupun finansial. Namun tantangan tidak berhenti. Peristiwa Permesta (1957–1961) membawa penderitaan besar bagi jemaat, namun juga menunjukkan peran gereja sebagai agen perdamaian, seperti ditunjukkan oleh Ds. A.Z.R. Wenas. Hal ini menegaskan pentingnya kerja sama antara gereja dan pemerintah dalam membangun perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, GMIM menghadapi ancaman dari ideologi anti-gereja seperti PKI dan PNI. Di tengah tekanan ini, GMIM tetap menjaga integritasnya dan memperkuat batas antara gereja dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh Calvin bahwa gereja harus berhati-hati terhadap intervensi negara. Pada akhir kepemimpinan Ds. Wenas (1966–1967), hubungan GMIM dan pemerintah berada dalam tahap kemitraan yang saling melengkapi. Salah satu bentuk konkret adalah perhatian pemerintah terhadap kebutuhan rohani dalam institusi seperti ABRI pasca konflik nasional. Dari seluruh perjalanan ini, jelas bahwa sejarah hubungan GMIM dan pemerintah telah membentuk GMIM menjadi gereja yang mandiri, kuat, dan berintegritas seperti yang dikenal saat ini. Tanpa peristiwa-peristiwa penting dan pergumulan masa lalu, GMIM mungkin tidak akan mencapai keberadaan dan pengaruhnya seperti sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alister E. McGrath. *Sejarah Pemikiran Reformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Andewi, Leni Anggraeni, Afrizal Martin, Dian Puspita, Novi Ayu Kristiana Dewi, Marilyn Kristina, Erliza Septia Nagara, Bernadhita Herindri Samodera Utami, Noca Yolanda Sari, dan Widi. *METODOLOGI PENELITIAN*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Berkhof, Hendrikus. *Sejarah gereja*. BPK Gunung Mulia, t.t.
- D.M. Lintong. *Apakah Engkau Mengasihi Aku? Sejarah GMIM Jilid 1*. Tomohon: Unit Percetakan Sinode GMIM, 2004.
- "Ds. A.Z.R Wenas 1897-1967 Pelajan Gereja di Minahasa," t.t. Arsip GMIM.
- Gosal, Riedel Ch. "Sejarah Ekumene GMIM Tahun 1934-1980." *Titian Emas* 1, no. 1 (11 Juli 2020): 73-98.
- Gosal, Riedel Christian. *Minaesa Beresa: Suatu Studi tentang Peranan GMIM dalam Gerakan Keesaan di Indonesia Tahun 1934-1980*. CV. Bintang Semesta Media, 2024.
- Jonely Ch. Lintong. *Satu Bab Sejarah GMIM Uraian Historis tentang Tata Gereja 1934-1981*, 1986.
- Josef M. Saruan. *Masa Awal Pertumbuhan GMIM*. Tomohon: Bidang AIT Kantor Sinode GMIM, t.t.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- "Notulen Rapat Badan Pekerja Sinode GMIM," 1967.
- "Sejarah GMIM Masuk Minahasa," t.t. Arsip GMIM.
- Sejarah Jemaat GMIM Sion Tomohon*. Tomohon, 2014.
- "Sejarah Singkat GMIM Masuk Minahasa," t.t. Arsip GMIM.
- Sulu, Phill M. *Permesta Dalam Romantika, Kemelut, & Misteri*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- TATA GEREJA 2021. Tomohon: Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, 2021.
- Toreh, Grace. "PERANAN GMIM (GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA) DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT DI BIDANG POLITIK." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 1 (1 Mei 2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/1448>.